



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

- (2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Bab VII : Penutup.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam menyusun:

- a. rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024; dan
- b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2024.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 28 Agustus 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 23.

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

KODE URUSAN	URUSAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU
1.01	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	116,696,312,000
1.01	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan	0	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	431,152,567,000
1.01	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN	7,500,000,000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINASKESEHATAN	4,100,000,000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINASKESEHATAN	48,242,926,902
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINASKESEHATAN	215,738,489,131
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINASKESEHATAN	1,000,000,000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINASKESEHATAN	17,243,748,000

1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BLUD RSUD Papua Barat	0
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	BLUD RSUD Papua Barat	2,500,000,000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	44,096,973,864
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	145,006,146,646
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	31,773,055,857
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	00,000,000,000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	45,813,130,250

	UMUM DAN PENATAAN RUANG				
0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	18,252,730,062
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	180,000,000,000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1,101,000,000,000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	11,281,000,000

	UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PPERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	15,658,722,387
0	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PPERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7,750,000,000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3,550,000,000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,250,000,000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,250,000,000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	6,550,000,000

1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL	5,180,000,000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	4,800,000,000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL	20,272,330,149
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL	5,000,000,000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	0
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	8,961,462,260
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3,550,000,000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2,058,000,000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2,500,000,000
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	550,000,000
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1,450,000,000

3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2,000,000,000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,295,669,968
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,640,000,000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,733,800,000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6,359,978,716
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	820,000,000

2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,610,000,000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	940,000,000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	200,000,000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100,000,000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100,000,000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.29.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN	10,650,000,000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.29.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	4,350,000,000

2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.29.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	10,000,000,000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	250,000,000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	40,500,000,000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02	PROGRAM ERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	0
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	3,000,000,000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	250,000,000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	1,000,000,000

2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	1,000,000,000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	250,000,000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	250,000,000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	500,000,000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	500,000,000
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	900,000,000

2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,689,983,979
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,200,000,000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	2,100,000,000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	800,000,000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	900,000,000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	5,950,000,000

2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	17,650,000,000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN	14,732,103,958
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN	38,166,666,668
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	DINAS PERHUBUNGAN	61,298,429,193
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	5,200,000,000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	37,348,750,000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	100,000,000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	5,140,000,000

2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	400,000,000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	600,000,000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	800,000,000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,676,063,000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,000,000,000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7,927,072,742
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12,000,000,000

2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1,300,000,000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1,400,000,000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1,550,000,000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1,329,100,000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	0
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2,100,000,000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2,400,000,000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	270,000,000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,619,304,006

2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3,150,000,000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,550,000,000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	500,000,000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4,450,000,001
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5,700,000,000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3,301,832,500
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,100,000,000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,730,000,000

2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,593,000,000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	150,000,000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,930,000,000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	44,736,050,000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,954,000,000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,225,000,000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,075,000,000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	BLUD KKP RAJA AMPAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	3,000,000,000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	23,000,000,000

3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	18,811,976,000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1,250,000,000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	200,000,000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1,514,023,305
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10,699,462,855
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10,010,000,000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3,550,000,000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5,000,000

3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2,060,000,000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS KEHUTANAN	53,892,122,180
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	DINAS KEHUTANAN	1,580,000,000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	DINAS KEHUTANAN	3,800,000,000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	3,000,000,000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	200,000,000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	700,000,000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8,382,373,647

3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	81,376,489,842
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9,810,637,325
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1,999,999,932
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2,219,000,000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	792,871,278
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2,496,785,000
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	500,000,000
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1,003,215,154
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKERTARIAT DAERAH	169,500,965,287

4.01	SEKRETARIAT DAERAH	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BIRO UMUM	13,000,000,000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	0	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS	1,500,000,000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	9,200,000,000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2,200,000,000
4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	45,553,308,079
4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.05	PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	2,159,079,904
5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9,000,000,000
5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15,000,000,000
5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,075,366,226,294

5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9,200,000,000
5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3,002,484,165
5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5,983,566,530
5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	UPT SAMSAT KABUPATEN MANOKWARI	0
5.02	KEUANGAN	5.02.05	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	UPT SAMSAT KABUPATEN FAK FAK	0
5.02	KEUANGAN	5.02.06	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	UPT SAMSAT KABUPATEN TELUK BINTUNI	0
5.02	KEUANGAN	5.02.07	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	UPT SAMSAT KABUPATEN KAIMANA	0
5.02	KEUANGAN	5.02.08	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	UPT SAMSAT KABUPATEN WONDAMA	0
5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6,150,000,000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	18,416,103,567
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BLUD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	4,135,437,903

5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5,600,000,000
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	2,567,939,115
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT	12,713,092,000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT	390,830,000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,000,000,000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11,363,678,123
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10,868,298,716
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	796,680,000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,000,000,000

			NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
9.03	KEKHUSUSAN PAPUA BARAT	9.03.02	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	33,281,811,097